



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Bungur No.06 Telp. (0371) 625272
SUMBAWA BESAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : DIAN SIDHARTA, ST. MM
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : Ir. H. SYARAFUDDIN JAROT, M.P
Jabatan : Bupati Sumbawa
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumbawa Besar, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA
BUPATI SUMBAWA

Ir. H. SYARAFUDDIN JAROT, M.P

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN



DIAN SIDHARTA, ST. MM
NIP. 19741003 199902 1 001

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

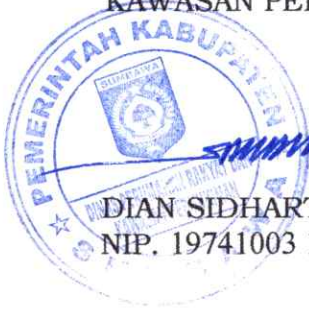
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Peningkatan Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas PRKP	B
2	Meningkatnya Kualitas perumahan dan permukiman	1	Indeks Penerapan SPM Perumahan	100%
		2	Indeks Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan	38,63%
3	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Sub Urusan Pertanahan Kewenagan Daerah	1	resentase capaian kinerja penyelenggaraan sub urusan pertanahan kewenangan daerah	100%

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN
			APBD
			(Rp)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.440.579.576
2.	Meningkatnya Kualitas perumahan dan permukiman	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	264.725.000
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	147.942.200
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.612.058.500
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	9.833.250.641
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sub urusan pertanahan kewenangan daerah	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.180.000
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	601.200.000
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	3.736.421
		PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	1.343.500

		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	1.343.500
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	3.933.000

Sumbawa Besar, 5 Januari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN



DIAN SIDHARTA, ST. MM
NIP. 19741003 199902 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Bungur No.06 Telp. (0371) 625272
SUMBAWA BESAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : INDRATHA KUSUMA RAYES,S,Sos
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : DIAN SIDHARTA, ST. MM
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumbawa Besar, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN




DIAN SIDHARTA, ST. MM
NIP. 19741003 199902 1 001

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN



INDRATHA KUSUMA RAYES,S,Sos
NIP. 19750527 199503 1 003

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai AKIP PD	Rp10.440.579.576,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.398.400,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan.	Rp2.711.100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA_SKPD tersusun	Rp2.407.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA_SKP perubahan tersusun	Rp3.091.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA_SKPD tersusun	Rp2.662.000,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA_SKP perubahan tersusun	Rp3.179.900,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp2.947.400,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp2.400.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp4.093.056.099,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Rp3.974.244.899,00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SKPD	Rp104.386.400,00
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Rp2.269.000,00
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD	Rp2.755.000,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan Keuangan akhir tahun SKPD	Rp2.419.900,00
6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp2.409.000,00
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp2.201.400,00
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp2.370.500,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp1.307.700,00
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD SKPD	Rp1.307.700,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp2.426.000,00

1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp1.032.000,00
2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen laporan hasil Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp1.394.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah		jumlah dokumen pengAdministrasian Umum Perangkat Daerah yg terlaksana	Rp74.427.288,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Rp1.330.288,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Rp1.687.000,00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Rp1.350.000,00
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang disediakan	Rp1.248.500,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi	Rp1.531.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	Rp66.235.500,00
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Pengelola dan Penata Arsip Dinamis pada SKPD yang difasilitasi	Rp1.045.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp18.520.900,00
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Rp1.217.000,00
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Rp16.477.900,00
3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Rp826.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Surat untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp5.935.283.239,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat (masuk & keluar)	Rp1.301.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dokumen Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp5.665.647.239,00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Rp1.353.000,00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Umum Kantor yang dilaksanakan	Rp266.982.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit barang Barang Milik Pemerintah yang terpelihara	Rp296.159.950,00

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan/ pembayaran Pajak/ pengurusan perizinan	Rp293.259.050,00
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/ direhab	Rp1.075.000,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhab	Rp497.500,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terPemeliharaan/Rehabilitasi	Rp1.328.400,00

Sumbawa Besar, 5 Januari 2026

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN



INDRATHA KUSUMA RAYES, S.Sos
NIP. 19750527 199503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Bungur No.06 Telp. (0371) 625272
SUMBAWA BESAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : RIZQI HELFIANSAH, ST, M.Eng

Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : DIAN SIDHARTA, ST. MM

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

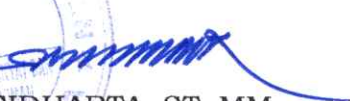
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumbawa Besar, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN



DIAN SIDHARTA, ST. MM
NIP. 19741003 199902 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KAWASAN PERMUKIMAN


RIZQI HELFIANSAH, ST, M.Eng
NIP. 19760622 200212 1 008

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Rp147.942.200,00
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		jumlah data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Rp5.224.700,00
1	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp1.095.200,00
2	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen Data Identifikasi lahan yang Potensil sebagai lokasi Relokasi Perumahan	Rp1.048.500,00
3	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Rp1.003.500,00
4	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen data rumah terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah	Rp1.064.500,00
5	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Rp1.013.000,00
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp142.717.500,00
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp76.051.500,00
2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp65.604.000,00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Penerima berdasarkan Jenis Pelayanan	Rp1.062.000,00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	Rp1.612.058.500,00
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang di tingkatkan kualitasnya	Rp1.612.058.500,00

1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertangani	Rp1.611.046.500,00
2	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaraan Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Rp1.012.000,00

Sumbawa Besar, 5 Januari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN
KAWASAN PERMUKIMAN


RIZQI HELFIANSAH, ST, M.Eng
NIP. 19760622 200212 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Bungur No.06 Telp. (0371) 625272
SUMBAWA BESAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : ALWAN PATAWARI, ST, MM.

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : DIAN SIDHARTA, ST. MM

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumbawa Besar, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN




DIAN SIDHARTA, ST. MM
NIP. 19741003 199902 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN
PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM



ALWAN PATAWARI, ST, MM.
NIP. 19811026 201001 1 017

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Rp264.725.000,00
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		jumlah data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Rp12.415.500,00
0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp0,00
0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah dokumen Data Identifikasi lahan yang Potensial sebagai lokasi Relokasi Perumahan	Rp0,00
0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah dokumen data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Rp0,00
0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah	Rp0,00
0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Rp12.415.500,00
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah rumah layak huni dan rumah khusus yang di bangun dan di rehabilitasi bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten	Rp252.309.500,00
0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Rerehabilitasi	Rp238.559.500,00
0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Rp13.750.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Peningkatan Persentase perumahan yang di lengkapi PSU	Rp9.833.250.641,00
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah Perumahan yang dilengkapi PSU	Rp9.833.250.641,00
0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Rp757.233.500,00

0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Rp402.686.500,00
0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Rp8.673.330.641,00

Sumbawa Besar, 5 Januari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN
PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM



ALWAN PATAWARI, ST, MM.
NIP. 19811026 201001 1 017



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Bungur No.06 Telp. (0371) 625272
SUMBAWA BESAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : SURBINI, SE. MM

Jabatan : Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : DIAN SIDHARTA, ST. MM

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

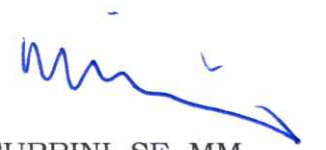
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumbawa Besar, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN


DIAN SIDHARTA, ST. MM
NIP. 19741003 199902 1 001

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERTANAHAN


SURBINI, SE. MM
NIP. 19730125 199902 1 001

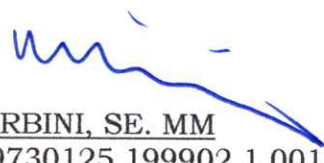
LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KEPALA BIDANG PERTANAHAN

PROGRAM/KEGIATAN/SUB.KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Jumlah Sengketa tanah garapan yang terselesaikan	Rp1.180.000,00
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.180.000,00
1	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.180.000,00
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Rp601.200.000,00
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah yang disusun	Rp601.200.000,00
1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Rp599.925.000,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp1.275.000,00
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	Rp3.736.421,00
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Subjek dan Objek Redistribusi Tanah yang disusun	Rp3.736.421,00
1	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp1.240.500,00
2	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Rp1.318.921,00

3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp1.177.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG		Persentase Penyelesaian Tanah Kosong yang difasilitasi	Rp1.343.500,00
Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		jumlah dokumen penyelesaian tanah kosong yang disusun	Rp1.343.500,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Rp1.343.500,00
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		Persentase capaian kinerja Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp1.340.000,00
Penerbitan Izin Membuka Tanah		jumlah dokumen izin membuka lahan yang disusun	Rp1.340.000,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Rp1.340.000,00
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Cakupan Penatagunaan Tanah	Rp3.933.000,00
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		jumlah dokumen penggunaan tanah yang disusun	Rp3.933.000,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp1.209.500,00
2	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Rp1.348.500,00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp1.375.000,00

Sumbawa Besar, 5 Januari 2026

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PERTANAHAN


SURBINI, SE. MM
NIP. 19730125 199902 1 001